



LAPORAN PENATAAN
TATA LAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2018

Jakarta, Desember 2018

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL



LAPORAN PENATAAN
TATA LAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2018

TIM PENATAAN TATA LAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DESEMBER 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan YME, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, laporan penataan tata laksana (*business process*) Setjen Wantannas ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penataan ini dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Permen PANRB nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, serta dilaksanakan oleh Tim Penataan Tata Laksana (*Business Process*) Setjen Wantannas Tahun 2018 yang ditunjuk melalui Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 136 Tahun 2018.

Penataan tatalaksana (*business process*) dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Target yang ingin dicapai melalui penataan ini antara lain adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Setjen Wantannas. Sebagai institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral, seyogyanya responsif terhadap dinamika perubahan. Oleh karena itu, kegiatan penataan tatalaksana (*business process*) Setjen Wantannas ini menjadi sesuatu yang senantiasa dilakukan dalam rangka menjawab perubahan kebijakan dan kondisi lingkungan strategis. Melalui penataan ini diharapkan dapat diperoleh langkah-langkah konkrit untuk menyempurnakan tatalaksana (*business process*) Setjen Wantannas.

Penataan tatalaksana (*business process*) Setjen Wantannas akan dilakukan setiap tahun dan langkah-langkah penyempurnaan tatalaksana (*business process*) secara fungsional maupun struktural menjadi upaya prioritas utama yang akan dilakukan Setjen Wantannas kedepan sesuai dengan rekomendasi hasil penataan ini.

Jakarta, Desember 2018

Tim Penataan Tata Laksana (*Business Process*) Setjen Wantannas Tahun 2018
Ketua



Bayu Roostono, SH., MH
Marsekal Pertama TNI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Pengertian dan Prinsip.....	3
BAB II KONSEPSI BINTANNAS DAN BINBELNEG	6
A. Ketahanan Nasional	6
B. Pembinaan Ketahanan Nasional	7
C. Pembinaan Bela Negara.....	8
BAB III PROSES PENATAAN TATA LAKSANA.....	6
A. Manajemen Tata Laksana	9
B. Metodologi.....	10
C. Penentuan Standar Tata Laksana.....	11
D. Analisi Tata Laksana.....	12
BAB III PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Rekomendasi	58

PENATAAN TATA LAKSANA (*BUSINESS PROCESS*) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan tata laksana (*Business Process* disingkat BP) yang dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana bertujuan untuk mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Setjen Wantannas.

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) terbentuk melalui Keppres nomor 101 Tahun 1999. Wantannas memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Sementara Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

BP yang berlangsung saat ini dinilai belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Nasional (BINTANNAS) secara efektif dan efisien, disamping adanya tuntutan dari program Reformasi Birokrasi untuk senantiasa menata dan menyempurnakan BP. Oleh karena itu Setjen Wantannas melaksanakan penataan dan penyempurnaan BP agar terwujud birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta tingkat pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Penataan dan penyempurnaan BP menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis baik lingkup global, regional, maupun nasional. Pada lingkup global perkembangan yang signifikan dan memberikan pengaruh yang sangat besar, diantaranya semakin berkembangnya kemajuan TIK yang mendorong munculnya *e-government* yang modern berbasis prinsip-prinsip *good governance*. Pada lingkup regional yang mengemuka diantaranya kecenderungan banyaknya negara-negara di kawasan yang telah melaksanakan reformasi birokrasi secara intensif untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Sedangkan pada lingkup nasional, diantaranya kebijakan Pemerintah yang mutahir seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang mengamanatkan kewajiban penataan BP setiap K/L dalam rangka mencapai pelayanan publik yang transparan dan akuntabel; Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi pemerintah; Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Administrasi Pemerintahan; arahan Presiden dalam Surat Sekretaris Kabinet tanggal 3 Pebruari 2017 tentang perintah Presiden bahwa masalah Bela Negara agar diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional dengan tidak membentuk organisasi baru; serta Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 dimana menugaskan Setjen Wantannas untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terkait aksi nasional bela negara.

Berdasarkan uraian di atas, penataan dan penyempurnaan BP di lingkungan Setjen Wantannas dilaksanakan agar :

1. Terwujud persamaan persepsi tentang manajemen BINTANNAS dan BINBELNEG;
2. Tersedia acuan untuk pembuatan atau perbaikan *Standar Operating Procedure* (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan;
3. Tersedianya bahan perbaikan struktur organisasi; dan
4. Tersedia acuan pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (*job descriptions*).

B. Tujuan

Tujuan penataan dan penyempurnaan BP adalah untuk membangun dan menata BP Setjen Wantannas yang lebih adaptif, efisien, efektif, produktif dan akuntabel dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan struktur organisasi, perbaikan uraian perkerjaan dan penyusunan *standard operating procedures* (SOP) termasuk SOP pelayanan. Penataan dan penyempurnaan BP didasarkan pada evaluasi atas BP yang telah ada dan diimplementasikan, masukan internal, serta laporan dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan eksternal lainnya.

Sasaran penataan dan penyempurnaan BP diantaranya:

1. Penurunan biaya;
2. Peningkatan kualitas output;
3. Peningkatan kualitas layanan; dan
4. Peningkatan kecepatan delivery.

C. Pengertian dan Prinsip

1. Pengertian

a. TATA LAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)

Sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b. PETA BISNIS PROSES

Dokumen tertulis yang memuat alur aktivitas kerja dengan terstruktur dan sistematis serta menghasilkan keluaran.

c. AKTIVITAS

Serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tata laksana.

d. PENGGUNA

Penerima keluaran yang dihasilkan suatu tata laksana sesuai dengan kebutuhannya.

e. FUNGSI KUNCI (*KEY FUNCTION*).

Fungsi produktif hierarki pertama dalam mencapai tujuan utama atau sasaran strategis. Untuk mencapai tujuan utama diperlukan sejumlah fungsi kunci yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung. Fungsi kunci ini dapat dipersamakan dengan tugas/fungsi pokok satuan kerja eselon I di Setjen Wantanas.

f. FUNGSI UTAMA (*MAJOR FUNCTION*).

Fungsi produktif hierarki kedua yang merupakan jabaran lebih lanjut dari fungsi kunci. Setiap fungsi kunci terdiri dari sejumlah fungsi utama yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung. Fungsi utama dalam kajian ini terkait dengan tugas/fungsi pokok satuan kerja eselon II di Setjen Wantanas.

g. FUNGSI DASAR (*BASIC FUNCTION*).

Fungsi produktif hierarki ketiga yang merupakan jabaran lebih lanjut dari fungsi utama. Setiap fungsi utama terdiri dari sejumlah fungsi dasar yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung. Fungsi dasar ini pada umumnya diidentifikasi sebagai unit kompetensi. Dalam konteks kajian ini, fungsi dasar merupakan tugas/fungsi pokok satuan kerja eselon III pada Setjen Wantanas.

h. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP).

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

i. POHON MASALAH

Analisis lingkungan strategis dilakukan melalui pendekatan pohon masalah yang menggambarkan sebab akibat suatu masalah dan diuraikan dalam faktor-faktor penyebab masalah sampai dengan akar masalah.

j. POHON KINERJA

Analisis lingkungan strategis untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi dalam pohon masalah.

k. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang harus memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Tercapai, Realistis, dan Berjangka Waktu)

l. TINGKATAN *BUSINESS PROCESS* (BP).

- 1) Level 0, merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis utama Instansi Pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari Visi dan Misi, Sasaran Strategis dan IKU yang ingin dicapai oleh Setjen Wantannas.
- 2) Level 1, merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
- 3) Level 2, merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1. Level 2 menggambarkan proses bisnis yang lebih rinci. Proses bisnis ini mencakup alur proses, alur informasi, masukan, keluaran, dan pelaksana dari setiap proses.
- 4) Level 3, merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 2, proses pada level 3 harus mendukung atau sejalan dengan proses yang ada pada level 2.

- 5) Level 4, menjabarkan proses-proses atau aktivitas yang lebih rinci dari level 3. L4 ini disebut juga sebagai SOP makro, yang selanjutnya dapat menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan SOP mikro setiap aktivitas.

2. Prinsip

a. DEFINITIF

Suatu tata laksana harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.

b. URUTAN

Suatu tata laksana harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang.

c. PELANGGAN

Suatu tata laksana harus mempunyai penerima hasil proses.

d. NILAI TAMBAH

Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.

e. KETERKAITAN

Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.

f. FUNGSI SILANG

Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus, mencakup beberapa fungsi.

BAB II

KONSEPSI PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL DAN PEMBINAAN BELA NEGARA

A. Ketahanan Nasional

1. Pengertian TANNAS

Ketahanan nasional (Tannas) diartikan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam pengertian di atas, kondisi kehidupan nasional bersifat dinamis dan dalam perwujudannya perlu dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Tannas bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional secara berkelanjutan berbasis pemikiran geostrategi sesuai kondisi bangsa dalam konstelasi geografi Indonesia.

2. Konsepsi TANNAS

Konsepsi Tannas Indonesia berprinsip pada pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan yang berfokus pada kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Prinsip ini menjadi pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan tercermin dari nilai-nilai nasional yang tumbuh dan berkembang demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah, dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan merupakan kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasional tersebut terhadap segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam.

3. Hakekat TANNAS

Tannas pada hakikatnya berupa keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hal tersebut berbentuk pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

B. Pembinaan Ketahanan Nasional

1. PEMBINAAN

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

2. BINTANNAS

BINTANNAS adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan kondisi ketahanan nasional yang semakin tangguh.

3. BINTANNAS sebagai Doktrin dan Strategi

BINTANNAS sebagai doktrin dasar nasional berfungsi untuk memberi arah agar terbentuk sinergi pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat inter-regional, inter-sektoral maupun multi-disiplin.

BINTANNAS sebagai strategi pembangunan nasional (Bangnas) didasarkan pada keterkaitan antara Tannas dan Bangnas. Bangnas dilakukan untuk mencapai kondisi Tannas yang tangguh, sebaliknya Tannas yang tangguh menjadi modal Bangnas dalam mencapai tujuan. BINTANNAS sebagai strategi merupakan pelaksanaan Bangnas dengan pendekatan Tannas yang mencakup Astragatra, yaitu:

- a. Trigatra atau gatra alamiah meliputi aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu. Unsur dari setiap aspek tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Trigatra meliputi gatra geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Ketiga gatra alamiah tersebut mengandung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif tetap atau statis.
- b. Pancagatra atau gatra sosial adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Pancagatra meliputi gatra ideologi, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan. Kelima gatra sosial tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis. Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu ditujukan pada kelima gatra sosial tersebut. Oleh karena itu, penanggulangannya adalah dengan upaya meningkatkan ketahanan dalam gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Pancagatra dalam kehidupan nasional Indonesia tersebut secara terintegrasi serta dalam interaksinya dengan trigatra mencerminkan tingkat ketahanan nasional Indonesia.

C. Pembinaan Bela Negara.

1. BELNEG

Bela Negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap Bangsa dan Warga Negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi “Upaya Bela Negara” (Buku Modul Utama Pembinaan bela negara, Setjen Wantannas, Hal.3).

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga Negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. (UU No 3 tahun 2002, penjelasan Pasal 9 ayat 1).

2. BINBELNEG

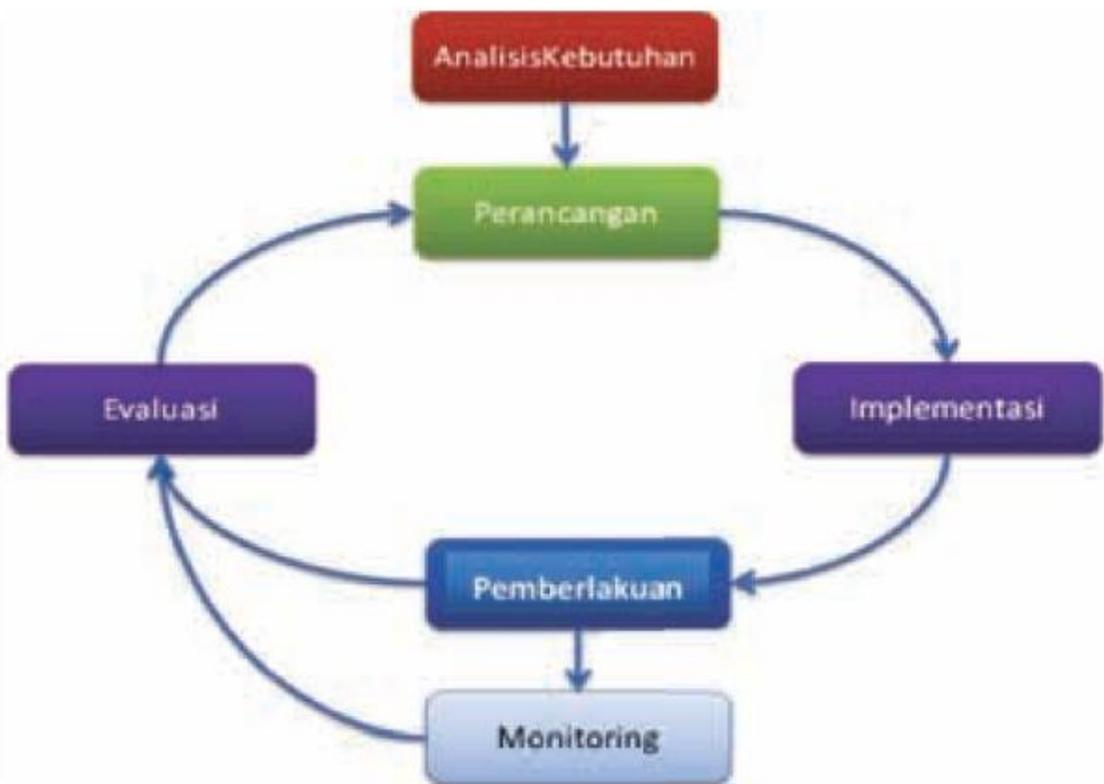
Pembinaan Bela Negara adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilaksanakan secara terprogram, terarah, dan terus menerus untuk menanamkan nilai-nilai dasar bela negara kepada seluruh warga negara, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.

Pembinaan Bela Negara mencakup Perumusan Rencana Induk, Rencana Aksi, Pembuatan modul pembinaan bela negara, pelaksanaan *training of trainer*, Pemantauan dan Monitoring, serta Evaluasi dan Pengembangan didukung oleh sistem informasi bela negara (Sisfo Belneg) yang terintegrasi dalam rangka memperkuat nasionalisme dan patriotisme.

BAB III PROSES PENATAAN TATA LAKSANA

A. Manajemen Tata laksana

Pendekatan yang banyak digunakan di lingkungan manajemen organisasi dan menjadi dasar dari proses penataan tata laksana adalah Manajemen Tata laksana (*Business Process Management*). Menurut pendekatan ini penataan tata laksana merupakan suatu siklus. Siklus dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1

Siklus Penataan Tata laksana (*business process*)

Dalam siklus tersebut penataan tata laksana tercakup dalam aktivitas analisis kebutuhan yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas Perancangan dengan menggunakan Pemodelan Proses. Meski proses penataan tata laksana sudah dilakukan hal ini tidak berarti tata laksana yang disusun telah memenuhi prinsip-prinsip dan manfaat suatu tata laksana. Oleh karena itu, setelah tersusun

modelnya, maka tata laksana harus dapat terimplementasi dengan baik dan diketahui keberhasilannya.

Setelah teruji dan memenuhi kriteria yang diharapkan selama implementasi, berikutnya dilakukan pemberlakuan. Pemberlakuan dilakukan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Tata laksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya tata laksana yang terbentuk dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilakukan evaluasi kehandalannya.

B. Metodologi

Metodologi penataan tata laksana mencakup dua aspek yaitu teknik pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara pengambilan data atau informasi sedemikian rupa sehingga data atau informasi yang diperoleh valid dan merepresentasikan seluruh aspek cakupan kajian. Analisis dalam kajian tata laksana lebih fokus pada pemahaman, pemetaan dan perbaikan seluruh tata laksana yang ada dalam organisasi sehingga dapat disusun suatu rekomendasi yang aplikatif sekaligus efektif dalam penerapannya. Metode yang dipilih adalah metode yang memungkinkan hasil tata laksana yang langsung dapat digunakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi antara beberapa tehnik, antara lain:

1. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi terpandu membahas suatu topik dimana peserta adalah para pemimpin unit kerja atau narasumber terkait topik dimaksud.

2. Observasi

Pengumpulan data/informasi mengenai pelaksanaan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rentang waktu tertentu.

3. Telaah Dokumen

Penggalian data dan informasi dari berbagai dokumen baik berupa buku, surat-surat keputusan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan tertulis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kausal

Telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.

2. Klasifikasi Proses

Memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

3. Pemodelan Proses

Pembuatan rumusan tata laksana dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

Langkah-langkah untuk melakukan pemetaan dan analisis tata laksana:

1. Memahami arahan strategis organisasi (visi, misi, tugas dan fungsi organisasi);
2. Mengidentifikasi tata laksana yang akan dipetakan berdasarkan analisis kebutuhan;
3. Mengidentifikasi nama dan tipe tata laksana dimaksud;
4. Menentukan siapa saja pengguna atau pemakai utama dari tata laksana dimaksud;
5. Menguraikan urutan kegiatan yang membentuk rantai tata laksana dimaksud;
6. Menentukan masukan utama tata laksana dimaksud;
7. Menentukan keluaran utama tata laksana dimaksud;
8. Menentukan pemilik (*owner*) tata laksana dimaksud;

C. Penentuan Standar Tata Laksana

Penentuan standar tata laksana adalah untuk memberikan suatu kepastian bagi para pengguna tata laksana yang merupakan bagian dari proses analisis tata laksana dan hal yang penting bagi Setjen Wantannas, terutama dalam melayani para pemangku kepentingan eksternal (publik/masyarakat dan Kementerian/Lembaga yang lain).

Penentuan standar tata laksana dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut (termasuk kombinasinya), antara lain:

1. *Focused Group Discussion* (FGD), dengan melibatkan sekurang-kurangnya penanggungjawab operasionalisasi proses yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Masukan dari pengguna langsung tata laksana dan/atau survei kepuasan pengguna atas pemberian layanan tata laksana; dan
3. *Benchmark* dengan Kementerian/Lembaga yang telah menetapkan standar untuk tata laksana yang sama atau sejenis.

Dalam implementasinya, penetapan atas standar suatu tata laksana yang telah disetujui pada akhirnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *Standard Operating Procedures (SOP)* atas tata laksana tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Setjen Wantannas.

D. Analisis Tata laksana

Analisis tata laksana dimulai dari suatu analisis kebutuhan dengan cara memahami visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, serta kebutuhan pihak-pihak eksternal yang memerlukan dan mendapatkan layanan langsung dari organisasi. Pemahaman dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen terkait dan diskusi dengan pimpinan organisasi, seperti *Focused Group Discussion (FGD)*. Tujuan analisis tata laksana adalah untuk melihat secara utuh rangkaian proses yang mempengaruhi kinerja dan pencapaian organisasi dalam melayani pemangku kepentingan utama, baik eksternal maupun internal.

Gambaran secara utuh tersebut dituangkan dalam analisis pemetaan kinerja bintannas dan binbelneg sebagai berikut:

1. BINTANNAS

Analisis pembinaan TANNAS pada masing-masing gatra adalah sebagai berikut:

a. Gatra Geografi

1) Kondisi dan Unsur Dominan

Dari geografi dapat diketahui tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk ke luarnya. Bentuk ke dalam menempatkan corak, wujud, dan tata susunan dan bentuk ke luar dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Negara Indonesia sebagai wadah bangsa Indonesia dengan batas-batas nasionalnya memberikan ciri yang membedakannya dengan negara lain dan memberikan kemungkinan untuk melangsungkan serta mengembangkan perikehidupan nasionalnya. Kedudukan yang secara geografis berada pada posisi silang memberikan kepada Indonesia peranan yang sangat penting dalam persoalan global yang dapat berdampak positif dan negatif.

Beberapa kondisi umum gatra geografis adalah sebagai berikut:

a) Topografi

Wilayah negara Republik Indonesia berbentuk kepulauan dan terdiri atas lebih kurang 17.508 buah pulau. Luas seluruh wilayah kedaulatan lebih kurang 7,3 juta km dan dengan wilayah daratan sekitar 1.919.17 km serta dengan memperhitungkan ZEE, luas wilayah daratan dan wilayah lautan adalah satu berbanding empat

(1:4). Bagian barat wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar, sedangkan bagian timur merupakan kumpulan pulau-pulau kecil, kecuali Papua. Pantai-pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik pada umumnya lebih curam dan terjal apabila dibandingkan dengan pantai-pantai landai yang berbatasan dengan laut pedalaman Indonesia.

b) Posisi Astronomis

Indonesia terletak di antara 95 dan 141 Bujur Timur, antara 6 Lintang Utara dan 11 Lintang Selatan, serta Indonesia berada di daerah tropik geostationary orbiter (GSO) yang terletak di atas khatulistiwa merupakan ruang wilayah yang sangat strategis sebagai tempat kedudukan satelit. Wilayah Indonesia merupakan wilayah khatulistiwa terpanjang di dunia. Karena letaknya di daerah tropik, iklim Indonesia secara umum panas dan lembab serta banyak gunung berapi. Tumbuh-tumbuhan subur dan hutan terdapat di pulau-pulau sebelah barat, sedangkan semakin ke timur hutan semakin jarang, kecuali di Papua. Di pulau-pulau Sumba, Sumbawa, dan sekitarnya terdapat padang-padang rumput yang luas.

Iklim tersebut berpengaruh terhadap aspek perikehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga terhadap pertahanan dan keamanan. Sebelah timur wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik, wilayah Papua Nugini, dan Australia. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah India (Andaman, Nikobar), Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Sebelah barat dan selatan dengan Samudera Hindia.

2) Analisis

Wilayah negara Republik Indonesia adalah wilayah negara kepulauan dengan luas laut 4 x luas daratan dan terdiri atas ribuan pulau sehingga masalah komunikasi dan transportasi menjadi sangat vital. Lalu lintas internasional banyak melintasi laut dan udara wilayah Indonesia. Hal itu memberi kemungkinan kepada Indonesia untuk memainkan peranan sebagai pengawas dan pengatur lalu lintas tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Wilayah sebagai ruang hidup belum dimanfaatkan secara proporsional. Persebaran penduduk Indonesia masih kurang proporsional. Pulau Jawa sangat vital dan strategis sehingga sangat memerlukan perhatian. Penduduk Indonesia yang mendiami pulau-pulau sebelah utara sangat sedikit jika dibandingkan dengan penduduk negara tetangga yang besar, seperti Jepang, RRC dan India, sedangkan negara tetangga disebelah selatan, yaitu Australia, penduduknya lebih sedikit. Dengan demikian, daerah-daerah Indonesia yang relatif kosong berserta kekayaan alamnya yang potensial dan melimpah

dapat dijadikan sasaran bagi pencarian *lebenstraum* oleh kekuatan-kekuatan dari luar.

3) Arah Pembinaan

- a) Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus jelas dan diketahui oleh seluruh bangsa di dunia. Perbatasan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi ditetapkan melalui perjanjian dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Pada bagian wilayah yang tidak berbatasan dengan negara lain (di Samudera Hindia dan Pasifik) ditetapkan sesuai dengan ketentuan internasional.
- b) Indonesia menjamin kepentingan bangsa-bangsa di dunia bagi kepentingan lintas damai, baik melalui laut maupun udara sesuai dengan ketentuan. Udara di sepanjang wilayah khatulistiwa mempunyai arti penting bagi pemanfaatan GSO secara maksimal.
- c) Pemanfaatan wilayah yang didasarkan atas konsepsi tata ruang dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempertahankan adanya pelestarian alam dan lingkungan hidup yang layak dalam wilayah ruang hidup bangsa Indonesia dan dengan memperhatikan ciri khas potensi wilayah.
- d) Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, seimbang, dan merata guna menekan kesenjangan spasial (antarwilayah/antar-daerah).
- e) Untuk mewujudkan kesatuan wilayah, perlu penyediaan sarana, prasarana komunikasi, dan transportasi yang menjamin mobilitas informasi, orang, barang dan jasa, serta pelaksanaan pembangunan nasional secara utuh menyeluruh.
- f) Indonesia menanamkan kesadaran masyarakat sedini mungkin tentang konstelasi geografis Indonesia, baik kerawanan maupun potensinya.

b. Gatra Kekayaan Alam

1) Kondisi dan Unsur Dominan

Kekayaan alam menurut jenisnya dibedakan dalam delapan golongan sebagai berikut:

- a) Hewan (fauna);
- b) Nabati (flora);
- c) Mineral (minyak bumi, uranium, biji besi, batu bara dan lain-lain);
- d) Tanah (tempat tinggal, tempat berpijak, tempat bercocok tanam);
- e) Udara (sinar matahari, oksigen, karbondioksida);
- f) Potensi ruang angkasa;
- g) Energi alami (gas alam, panas alam, air artetis, geotermis); serta
- h) Air dan lautan.

Kekayaan alam menurut sifatnya dibedakan dalam tiga golongan, yaitu yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, dan yang tetap.

Kekayaan alam Indonesia adalah segala sumber dan potensi alam di permukaan serta di dalam bumi, laut, dan dirgantara yang berada di wilayah kekuasaan dan yurisdiksi nasional negara Republik Indonesia. Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Konsep penguasaan oleh negara tersebut berarti bahwa warga negara Republik Indonesia boleh mengusahakan serta memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Sumber-sumber kekayaan alam sebagai karunia Tuhan adalah untuk memberi kehidupan kepada makhluknya dan kekayaan wilayah Indonesia, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Hanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak tidak diizinkan diusahakan perseorangan. Tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segenap potensi sumber alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan rakyat Indonesia secara berlanjut berlandaskan wawasan Nusantara.

2) Analisis

Lokasi dan konsentrasi sumber kekayaan alam tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak sesuai dengan persebaran dan kemampuan penduduk Indonesia sehingga dapat menimbulkan kesenjangan spasial.

Seiring dengan meningkatnya intensitas pembangunan nasional, akan meningkatkan pula eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Khusus untuk kekayaan alam yang tidak terbarukan, eksploitasi yang terus-menerus akan mengakibatkan kekayaan alam tersebut menjadi komoditas langka sehingga nilainya menjadi strategis dan dapat mengandung kekuatan dari luar untuk menguasainya.

Pemanfaatan kekayaan alam secara optimal memerlukan modal, pengetahuan, teknologi, serta tenaga yang terampil dan kondisi pasar di dalam dan luar negeri.

Pelestarian daya dukung kekayaan alam dipengaruhi oleh kesadaran dan tanggung jawab semua pihak.

3) Arah Pembinaan

- a) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh dan untuk bangsa Indonesia dengan cara-cara yang tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam keadaan kemampuan nasional masih terbatas, dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan asing dengan syarat yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.
- b) Pemanfaatan kekayaan alam komoditas yang mempunyai nilai ekonomis harus didasarkan pada prinsip peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk setempat dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sehingga mengurangi kesenjangan spasial dan peningkatan pembangunan daerah.
- c) Pemanfaatan kekayaan alam sebagai sumber energi harus diarahkan pada upaya menghemat pemakaian sumber minyak dan gas bumi serta menggantikannya dengan sumber nonminyak seperti batu bara, tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga nuklir, serta energi nonkonvensional seperti biogas, biomas, tenaga angin, dan tenaga surya. Sumber energi yang transportabel (mudah diangkut) dimanfaatkan untuk ekspor.
- d) Pemerintah melindungi serta mengelola kekayaan alam dengan cara tepat, terarah, dan bijaksana serta lebih mementingkan manfaat untuk rakyat banyak dengan meningkatkan kemampuan teknologi tepat guna dan meningkatkan kualitas SDM yang mampu mengelola.
- e) Pemerintah melakukan inventarisasi tentang jumlah, mutu jenis dan persebaran kekayaan alam untuk mengetahui potensi riil yang dapat dimanfaatkan.
- f) Pemerintah membina kesadaran nasional untuk pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam serta penggarapan secara tersinkronisasi dan terintegrasi oleh berbagai pihak guna pencapaian hasil yang optimal serta pengamanan yang maksimal sehingga tetap terjaga kondisi kelestarian dan keharmonisan lingkungan.

c. Gatra Kependudukan

- 1) Kondisi dan Unsur Dominan Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu dalam waktu yang tertentu. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, susunan, persebaran, pertumbuhan, ciri-ciri, kualitas, kesejahteraan penduduk, serta kondisi lingkungannya dengan unsur-unsur dominannya meliputi hal-hal berikut.

- a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayah. Jumlah penduduk berubah akibat proses mortalitas, fertilitas, dan migrasi.

b) Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah susunan penduduk berdasarkan suatu pendekatan tertentu, misalnya, menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, dan tingkat pendidikan.

c) Persebaran penduduk yang ideal adalah persebaran yang sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran dan mobilitas yang proporsional.

d) Kualitas Penduduk

Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk ialah faktor fisik dan nonfisik. Faktor fisik terdiri atas kesehatan, gizi, dan kebugaran. Faktor nonfisik ialah mentalitas dan intelektualitas.

2) Analisis

a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif, akan merupakan modal yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan di segala bidang. Jika tidak demikian, akan timbul pengangguran, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan problem sosial dapat melemahkan ketahanan nasional.

b) Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Pengaruh mortalitas relatif kecil karena terhadap pria dan wanita relative sama. Begitu juga dengan faktor migrasi karena tidak dilaksanakan secara besar-besaran dan diperlukan dukungan biaya yang tidak sedikit.

Sebaliknya, fertilitas sangat besar pengaruhnya, terutama terhadap komposisi umur dan jenis kelamin penduduk golongan muda. Bertambahnya penduduk golongan muda menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Apabila persoalan tersebut tidak diatasi, akan timbul kegoncangan sosial.

c) Persebaran Penduduk

Kenyataan menunjukkan bahwa manusia bertempat tinggal di daerah yang aman serta memungkinkan jaminan kehidupan ekonomis semaksimal mungkin, yaitu di daerah yang ekonomis dan strategis, terutama di daerah yang sudah digarap atau telah

dipersiapkan sebelumnya. Konsekuensinya ialah bahwa di daerah tertentu terlampau padat, sedangkan di daerah lainnya menjadi jarang, bahkan tidak berpengaruh sama sekali.

d) Kualitas Penduduk

Untuk mengatasi masalah penduduk, kebijakan pemerintah yang mengatur, mengendalikan, atau menciptakan iklim yang dengan jumlah, komposisi, persebaran, dan penduduk melalui berbagai cara seperti pusat-pusat pertumbuhan, keluarga berencana, transmigrasi, di samping meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental serta pengembangan sosial ekonomi. Semua itu dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kenaikan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan persebaran penduduk yang proporsional serta keserasian kesejahteraan dan keamanan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan.

3) Arah Pembinaan

- a) Pembangunan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan harus didukung dengan pengaturan pertumbuhan dan persebaran penduduk secara serasi serta peningkatan kualitas penduduk yang memadai dengan memperhatikan komposisi penduduk yang ada.
- b) Pengaturan laju pertumbuhan penduduk dirumuskan dalam kebijakan gerakan keluarga berencana nasional dan program di luar keluarga (*beyond family planning program*) yang mendukungnya secara terpadu.
- c) Pengaturan penyebaran penduduk dapat dilakukan dengan jalan peningkatan usaha transmigrasi yang terpadu dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam hal ini, perlu didorong timbulnya transmigrasi swakarsa.
- d) Pengaturan kualitas penduduk dilakukan dengan cara peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta derajat dan manfaat yang dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia secara fisik, antara lain, meningkatkan derajat kesehatan, perbaikan mutu, dan kebugaran fisik dengan peningkatan keahlian keterampilan daya manusia secara terarah dan berlanjut, peningkatan keimanan, dan ketakwaan.
- e) Pengaturan laju penduduk dilakukan dengan memberi kesempatan dan pemberdayaan penduduk khususnya wanita dan generasi muda Pelaksanaan kebijakan tersebut di atas harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

d. Gatra Ideologi

1) Konsepsi tentang Ketahanan Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar atau dari dalam, yang langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan ideologi tersebut diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut. Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai spiritual memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai itu berfungsi sebagai kekuatan mental spiritual dan landasan etik dalam ketahanan nasional. Dengan demikian, ateisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama.

Sila Persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang pluralistic mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat dan menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebaliknya, kepentingan pribadi dan golongan diserasikan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan

nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai sikap adil, menghormati hak orang, dan sikap gotong royong, yang menjamin dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk mencapai ketahanan ideologi, diperlukan penghayatan dan pengalaman Pancasila secara murni dan konsekuen, baik objektif maupun subjektif. Pelaksanaan objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan di bawahnya serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara.

Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik, dan fleksibilitas sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai dengan realitas perkembangan kehidupan, tetapi sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalamnya.

2) Analisis Permasalahan

Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan ideologi, antara lain, adalah sebagai berikut.

a) Kemajemukan Masyarakat Indonesia

Secara sosiologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, bahasa, pandangan hidup, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai norma kehidupan yang berbeda. Perbedaan itu dapat memperkaya dan memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa. Akan tetapi di pihak lain hal itu dapat merupakan titik-titik rawan yang menimbulkan primordialisme sempit yang mengarah pada perpecahan bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk ini perlu selalu ditumbuhkembangkan faktor-faktor perekat persatuan bangsa, yaitu tekad dan semangat untuk secara bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama.

b) Perkembangan Dunia

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi atau informasi dan transportasi menyebabkan dunia terasa semakin sempit, transparan, dan tanpa batas yang semakin mengglobal. Proses globalisasi ini tercermin dalam globalisasi informasi dan globalisasi ekonomi, yang membawa sistem nilai baik yang bersifat positif yang mendorong ke arah kemajuan dan modernisasi maupun yang bersifat negatif yang dapat memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa serta sendi-sendi kehidupan di seluruh aspek kehidupan nasional, bahkan juga menjungkirbalikkan nilai-nilai dasar yang telah berakar dan telah mapan dalam NKRI. Dalam perkembangan dunia seperti ini, bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada identitas dan integritas nasional serta tidak terpengaruh pada nilai global yang bertentangan dengan Pancasila.

c) Kepemimpinan

Peranan kepemimpinan, baik formal maupun informal, dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menduduki tempat yang sangat strategis dan menentukan dalam masyarakat Indonesia. Penonjolan sikap dan tingkah laku seorang pemimpin dan kerabat keluarganya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila akan memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat lingkungannya. Pengamalan nilai-nilai ini untuk masyarakat Indonesia ditentukan oleh suri teladan para pemimpin yang menjadi anutan masyarakat. Lunturnya nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari setiap pelaksanaan pemilihan pemimpin saat ini yang cenderung ditentukan melalui cara pemungutan suara (voting) daripada melalui musyawarah mufakat.

d) Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional dilandasi oleh moral dan etika yang sesuai dengan sistem nilai yang telah disepakati bersama berdasarkan Pancasila. Pembangunan yang berhasil akan lebih memantapkan Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara. Kegagalan pembangunan nasional akan membuka kemungkinan bangsa Indonesia yang berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depannya dan didasari oleh ideologi lain seperti liberalisme atau komunisme.

Dengan Pancasila, gerak dan laju pembangunan Indonesia harus dapat memberikan kehidupan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan bersama.

3) Pembinaan Ketahanan Ideologi

Untuk memperkuat ketahanan ideologi, perlu langkah pembinaan sebagai berikut.

- a) Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan.
- b) Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
- c) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara yang bersumber dari Pancasila harus tetap dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan negara. Di samping itu, perlu dituntut sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah memberikan penghormatan dan penghargaan yang wajar terhadap kebinekaan.
- d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan serta setiap warga negara Indonesia, dalam hal ini suri teladan para pemimpin merupakan hal yang sangat perlu.
- e) Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik materiil dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, strategi pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
- f) Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sebagai materi pokok serta mengintegrasikannya dalam mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa Indonesia, dan Kepramukaan. Pendidikan Moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara nonformal.

e. Gatra Politik

1) Konsepsi tentang Ketahanan Politik

Politik adalah satu aspek kehidupan nasional yang di satu sisi berkaitan dengan kekuasaan atau kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan di sisi lain berkaitan dengan penyaluran aspirasi rakyat sebagai wujud dari kedaulatan di tangan rakyat. Ketahanan politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar dan dari dalam yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Stabilitas politik yang sehat dan dinamis diwujudkan oleh adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hubungan antara penyelenggaraan pemerintahan negara dan masyarakat. Hubungan ini tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijakan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan sehingga kebijakan pemerintahan negara tersebut haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ketahanan nasional ini, masalah politik meliputi dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.

a) Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik.

(1) Struktur politik merupakan wadah penyaluran aspirasi berupa kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah dalam menjaring atau pengaderan pemimpin nasional.

(2) Proses politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik, kepentingan umum yang bersifat nasional, dan penentuan dalam pemilihan pemimpin, yang puncaknya terselenggara pemilu.

(3) Budaya politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional, baik melalui pendidikan politik maupun kegiatan-kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional.

- (4) Komunikasi politik berupa suatu hubungan timbal balik semua pihak yang terlibat dalam proses politik secara jujur dan terbuka yang memungkinkan terselenggaranya sosialisasi politik dengan baik.
- (5) Partisipasi politik adalah wujud kedaulatan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik rakyat sebagai sumber aspirasi maupun sebagai sumber pimpinan nasional.

b) Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945, yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta antipenjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

(1) Sebagai Bagian Integral dari Strategi Nasional

Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional ke dalam kehidupan antarbangsa. Dengan dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan nasional. Dengan demikian, politik luar negeri merupakan bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan salah satu sarana pencapaian tujuan nasional.

(2) Garis Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif dalam pengertian tidak pasif, yaitu peranan Indonesia dalam percaturan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi percaturan internasional, tetapi berperan serta atas dasar cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Karena heterogenitas kepentingan bangsa-bangsa di dunia, politik luar negeri harus bersifat kenyal, dalam arti bersikap moderat dalam hal kurang prinsipiil atau tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti yang ditentukan dalam pembukaan UUD 1945. Politik luar negeri juga harus lincah. Dengan dinamika perubahan-perubahan hubungan antarbangsa yang cepat dan tidak menentu di dunia, diperlukan daya penyesuaian yang tinggi demi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan-perkembangan itu.

Dalam menjalankan politik luar negeri, Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan berlandaskan falsafah Pancasila, UUD 1945, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Situasi internasional yang selalu berkembang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan politik luar negeri yang memerlukan penanganan dan penyesuaian.

Perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi, harus diikuti secara saksama agar dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat memengaruhi stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankan dan memanfaatkan peluang dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional

(3) Permasalahan Dominan yang Dihadapi

- Adanya kecenderungan dan dominasi dari negara adidaya yang selalu memaksakan kehendaknya merupakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Negara-negara yang kuat cenderung menerapkan pandangan-pandangan politik serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya kepada negara lain dalam hal modal, teknologi, dan pasar. Pembangunan hubungan luar negeri merupakan tantangan bagi Indonesia untuk mengatasi ancaman bentuk baru dalam rangka mempertahankan kedaulatan, kepribadian, dan kemandirian bangsa.
- Kecenderungan proteksionisme dan meningkatnya masalah perdagangan yang mempunyai dimensi politik merupakan hambatan bagi Indonesia untuk memperluas kegiatan perdagangan global. Sebaliknya, globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi mengakibatkan hubungan ekonomi internasional dan ekonomi nasional semakin tidak dapat dipisahkan karena adanya saling ketergantungan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana dapat mengatasi dampak negatif proteksionisme serta kemampuan memanfaatkan peluang hubungan ekonomi luar negeri.
- Dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta perwujudan penataan, tata dunia baru diperlukan optimalisasi persabatan dan kerja sama antarbangsa-bangsa dengan memanfaatkan forum dan organisasi internasional. Di

samping itu, diperlukan pula kemampuan berperan dalam upaya restrukturisasi, revitalisasi demokratisasi PBB, serta meningkatkan citra politik Indonesia di forum internasional. Dalam kaitan ini permasalahan yang dihadapi adalah pada kemampuan SDM dalam berdiplomasi dan aspek-aspek kelembagaan serta sarana penunjang lainnya.

2) Analisis Permasalahan

a) Analisis Politik Dalam Negeri.

Berdasarkan berbagai faktor dinamika kehidupan politik serta konsepsi dan permasalahannya, pelaksanaan politik dipengaruhi berbagai faktor, baik dalam maupun luar negeri sebagai berikut.

(1) Kepemimpinan Nasional

Dalam sistem pemerintahan, yang sangat dominan adalah faktor kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang kuat tidak hanya mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, pandai, tangguh, ulet, sehat lahir dan batin, jujur, bersih, dan berwibawa, tetapi juga memiliki seni kepemimpinan yang mampu menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras serta memiliki visi ke masa depan. Di samping itu, kepemimpinan nasional juga harus dapat menjaga dinamika kehidupan politik dalam kondisi paradigma nasional (Pancasila, UUD1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional), serta mampu mengambil kebijakan yang serasi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat.

Dengan kepemimpinan nasional yang demikian, sistem pemerintahan tidak menjurus pada pemusatan kekuasaan yang cenderung otoriter, tetapi juga tidak mengarah pada sistem politik yang liberal yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kepemimpinan nasional yang terpilih secara demokrasi akan mendapat dukungan kuat dari rakyat sehingga rakyat akan rela dan bersedia untuk turut melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.

Untuk menghindarkan terjadinya deviasi ke arah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang merugikan rakyat banyak, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu dibatasi. Di samping itu, pelaksanaan sistem pemerintahan juga sangat ditentukan oleh moral, etika, semangat, dan dedikasi para pengelola negara serta dihormatinya supremasi hukum dan kontrol nasional.

(2) Pemilihan Pembantu Presiden

Dalam sistem kabinet presidensial, presiden mempunyai hak prerogratif untuk memilih pembantunya. Kemutlakan hak prerogratif itu dapat mengakibatkan pemilihan pembantunya dengan pertimbangan subjektif presiden. Seyogianya presiden mendengar dan memperhatikan saran dari DPR RI/DPD serta sedapat mungkin mengikutsertakan berbagai kekuatan sosial politik yang ada sehingga kekuatan-kekuatan tersebut merasa ikut memiliki dan merasa turut bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan.

(3) Pemilihan Umum

Pelaksanaan sistem pemilihan umum (pemilu) yang dipergunakan hendaknya dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan menghayati aspirasi rakyat yang diwakilinya serta mampu menyalurkan dan memperjuangkannya. Pemilu dituntut dilaksanakan secara langsung, umum bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu akan memuaskan semua pihak sehingga masyarakat secara sadar termotivasi dan bergairah berpartisipasi dalam pemilu. Sebaliknya pemilu yang diwarnai oleh kecurangan, rekayasa serta manipulasi kehidupan politiknya dapat berkembang ke arah apatisme, atau ke arah ketidakpuasan, berakumulasi pada keresahan dan gejolak sosial.

(4) Wadah Penyalur Aspirasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam politik dapat tumbuh apabila aspirasinya dapat disalurkan melalui kelembagaan penyalur pendapat masyarakat, mulai dari tingkat desa sampai di tingkat pusat, melalui media massa, dan melalui kelembagaan lain.

Tersumbatnya wadah penyalur aspirasi ini akan mengakibatkan komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah tidak berjalan dengan lancar dan tidak transparan sehingga kedua belah pihak tidak memahami inisiatif dan aspirasi masing-masing. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat tidak serasi dengan tuntutan masyarakat. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya keserasian yang menjurus pada gejolak sosial.

(5) Kesamaan Visi dan Persepsi

Apabila belum terbentuk kesamaan visi dan persepsi antarfraksi dalam lembaga perwakilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan sulit dicari konsensus dalam pengambilan putusan. Oleh karena itu, perlu terus digalang adanya visi dan persepsi yang harmonis antarfraksi dan lembaga perwakilan agar konsensus yang rasional dapat

diciptakan dan diselenggaranya fungsi kontrol dengan sebaik-baiknya

(6) Disiplin Nasional dan Sistem Hukum Nasional

Disiplin nasional merupakan faktor dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa disiplin yang kuat, dinamika kehidupan dapat menyimpang ke arah yang tidak menentu, bahkan dapat membahayakan perikehidupan bangsa dan negara. Dengan disiplin, dapat diwujudkan ketertiban hukum, baik tertib administrasi, tertib politik, maupun tertib sosial.

Sangat erat kaitan antara disiplin dan sistem hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum atau law enforcement. Dengan pemantapan sistem hukum yang meliputi materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, serta kesadaran hukum masyarakat, kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berjalan dalam landasan hukum yang mantap serta masyarakat merasa terayomi, terangkat harkat dan martabat bangsanya, hidup dengan keteraturan, meningkatnya kesadaran politik rakyat akan hak dan kewajibannya serta terlepas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan perlakuan yang tidak adil.

Dengan demikian, lembaga peradilan dapat menjadi benteng terakhir untuk mencari keadilan.

(7) Pembauran Bangsa

Pembinaan pembauran bangsa menyangkut tiga pihak, yaitu pemerintah, warga negara Indonesia pada umumnya, serta WNI keturunan etnis lain atau asing. WNI keturunan etnis asing hendaknya menyadari bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang hidup dan mencari kehidupan di bumi Indonesia. Budaya asing yang dibawanya dapat diselaraskan dengan budaya daerah tempat mereka hidup sehingga dapat memberikan peran serta yang positif terhadap perkembangan budaya nasional. Yang terutama adanya kesadaran ikut memiliki (sense of belonging). Dengan demikian, akan tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi dan saling menjaga (sense of participation and sense of security) sehingga tidak hidup secara eksklusif, tetapi hidup dalam kebersamaan. Untuk mewujudkan pembauran itu, pemerintah harus berpegang pada prinsip kebersamaan yang rasialistis. Dengan demikian, pembauran dapat terwujud dan terhindar masalah SARA serta primordialisme yang sempit yang merawankan persatuan bangsa.

(8) Pemerataan Hasil Pembangunan

Pemerataan partisipasi politik rakyat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dititikberatkan pada daerah kabupaten/ kota dan dapat merupakan sarana pemerataan partisipasi politik rakyat untuk melaksanakan pembangunan di daerah itu sendiri.

(9) Keresahan Masyarakat

Dari analisis sebelumnya keresahan masyarakat, terutama keresahan di kalangan generasi muda dan mahasiswa, apabila tidak diakomodasi dan diatasi, dapat menimbulkan gejolak sosial.

Keresahan yang mudah timbul dalam negara yang sedang membangun, antara lain, disebabkan kesenjangan di berbagai bidang kehidupan, kesempatan memperoleh pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan, kesempatan mengeluarkan pendapat, dan kesempatan dalam berpartisipasi di bidang politik sehingga terjadinya kesenjangan antara tuntutan dan kenyataan. Untuk mengatasinya, diperlukan komunikasi dan dialog secara terbuka antarpihak-pihak yang terkait.

b) Analisis Politik Luar Negeri

Politik luar negeri dalam memperjuangkan serta mengamankan kepentingan nasional dan turut serta dalam upaya mewujudkan tatanan dunia baru didasarkan prinsip kepada politik luar negeri bebas dan aktif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kemampuan diplomasi proaktif guna memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai forum internasional.

Dalam menghadapi tantangan pada tingkat global, antara lain, adanya dominasi negara adidaya yang memaksakan kehendaknya berdampak negatif bagi kepentingan negara-negara berkembang perlu ditingkatkan kewaspadaan, keteguhan sikap, dan kemantapan ideologi dalam memelihara Tannas.

Kerja sama dan persahabatan antarbangsa perlu memanfaatkan berbagai forum dan organisasi internasional, meningkatkan peranan Indonesia dalam upaya restrukturisasi, revitalisasi dan demokratisasi PBB, serta meningkatkan kerja sama antarnegara ASEAN, Asia Pasifik, Gerakan Nonblok, OKI, dan kerja sama antarkawasan. Di samping itu, hubungan luar negeri perlu dikembangkan untuk meningkatkan citra Indonesia yang positif di luar negeri, meningkatkan investasi, meningkatkan pasar komoditas ekspor Indonesia, dan melindungi kepentingan dan hak-

hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri serta aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di luar negeri.

3) Pembinaan Ketahanan Politik

a) Ketahanan Politik Dalam Negeri

- (1) Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, tetapi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD 1945.
- (2) Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonis yang dapat menjerumuskan pada konflik atau bentrokan fisik. Di samping itu, harus dicegah timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- (3) Kepemimpinan nasional mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara.
- (4) Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dan antarkelompok atau golongan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional.

b) Ketahanan Politik Luar Negeri

- (1) Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan kesatuan bangsa, dan keutuhan NKRI.
- (2) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarnegara berkembang dan antara negara berkembang dan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Peranan Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerja sama antarbangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan. Kerja sama negara anggota ASEAN, baik pemerintah maupun masyarakat, terutama di bidang ekonomi, iptek, dan sosbud terus dilanjutkan dan dikembangkan. Peran aktif Indonesia dalam Gerakan Nonblok dan OKI serta mengembangkan hubungan demi kerja sama antarnegara di kawasan Asia Pasifik perlu terus ditingkatkan.
- (3) Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas, antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi, dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan olahraga.

- (4) Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan saksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta yang menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.
- (5) Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.
- (6) Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesamaan sikap serta kerja sama internasional dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global. Peran aktif Indonesia dalam pelucutan senjata dan dalam pengiriman serta pelibatan pasukan perdamaian dan peran serta di dalam penyelesaian konflik antarbangsa perlu terus ditingkatkan. Upaya restrukturisasi PBB terutama Dewan Keamanan terus dilaksanakan agar efektif, efisien, dan demokratis.
- (7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluh calon diplomat agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi. Selain itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek kelembagaan dan sarana penunjang lainnya.
- (8) Perjuangan bangsa Indonesia di dunia yang menyangkut kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan.

f. Gatra Ekonomi

1) Konsepsi Ketahanan Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan.

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam

menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan yang langsung atau tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

2) Analisis Permasalahan

Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan ekonomi, antara lain, adalah sebagai berikut.

a) Sifat Keterbukaan Sistem Perekonomian

Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan memberi corak atau warna terhadap kehidupan ekonomi dari negara tersebut. Sistem ekonomi liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Di lain pihak, sistem ekonomi sosialis dengan sifat perencanaan serta pengendalian penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Namun, tidak berarti bahwa sistem ini tetap stabil serta mampu menciptakan perekonomian yang lancar dan maju. Pada dasarnya sistem ekonomi suatu negara tak dapat dipisahkan dari ideologi yang dianut. Kini tidak ada lagi sistem ekonomi liberal murni atau sistem ekonomi sosialis murni. Sistem liberal yang terdapat di dunia kapitalis sudah menyerap beberapa unsur dari sosialisme, sedangkan negara-negara komunis sudah mulai memasukkan beberapa aspek kapitalisme meskipun dengan modifikasi tertentu.

Sistem ekonomi Indonesia terbuka terhadap perkembangan sistem ekonomi dunia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam sistem yang berdasarkan Pancasila.

b) Manajemen

Kegiatan ekonomi memerlukan penerapan manajemen yang tepat dan memadai untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produksi barang dan jasa. Jenis manajemen mana pun yang dipakai perlu ada dukungan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki motivasi,

disiplin, dan etos kerja. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya diciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis sehingga menggairahkan kalangan dunia usaha.

c) Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Perkembangan perekonomian tiap negara tidak dapat terlepas dari saling ketergantungan dari negara lain, terutama dalam era globalisasi. Namun, hubungan ekonomi dan perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral tidak saling menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor penyebabnya terutama terletak pada perbedaan dalam hal kekayaan, kemampuan, dan kesempatan. Karena perbedaan itulah timbul negara kaya dan negara miskin. Dalam lingkup internasional, masalah itu, antara lain, menjadi terkenal masalah Utara-Selatan atau Selatan-Selatan.

d) Diversifikasi Pemasaran

Peningkatan produksi perlu diikuti dengan perkembangan pasar, baik di pasar domestik maupun di pasar luar negeri. Menjual hasil produksi di pasar dalam negeri atau di pasar luar negeri akan menghadapi persaingan yang tidak ringan karena timbulnya kejenuhan pasar, persaingan harga, kualitas, dan pelayanan. Oleh karena itu, perlu senantiasa dicarikan pemasaran baru bagi produk yang dihasilkan. Artinya, diversifikasi pemasaran merupakan satu keharusan agar produksi terus bisa diperluas hingga ekspor dapat meningkat dan perolehan devisa akan meningkat pula.

e) Teknologi

Dalam kehidupan ekonomi, teknologi merupakan faktor penting bagi upaya peningkatan berbagai kegiatan ekonomi. Penggunaan teknologi mutakhir dapat lebih mendayagunakan sumber daya alam, baik yang potensial maupun yang nyata, tetapi tidak dapat menciptakan lapangan kerja langsung secara luas. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kemampuan perekonomian negara. Akan tetapi, di sisi lain teknologi dapat juga menimbulkan kerawanan karena ketergantungan yang besar terhadap pihak luar serta kurangnya kemampuan penguasaan teknologi serta pemanfaatannya. Negara berkembang pada umumnya menghadapi masalah pengangguran. Untuk itu, diperlukan pemilihan teknologi yang tepat guna, selain dapat memberikan nilai tambah dapat pula memberikan kesempatan kerja. Karena tuntutan kebutuhan, perlu pemanfaatan teknologi mutakhir dalam rangka memperoleh nilai tambah.

f) Struktur Ekonomi

Di negara-negara industri maju sektor industri merupakan kontribusi yang cukup besar pada PDB yang menentukan stabilitas

serta kondisi perekonomiannya. Adapun di negara-negara berkembang perekonomian didominasi oleh sektor nonindustri, terutama sektor pertanian dengan nilai perdagangan (terms of trade) yang hanya menguntungkan negara industri. Di negara berkembang di samping diperlukan sektor industry guna peningkatan nilai tambah, diperlukan juga sektor pertanian yang tangguh. Oleh karena itu, struktur ekonomi yang belum seimbang antara pertanian dan perindustrian mengandung berbagai kerawanan.

g) **Infrastuktur (Sarana dan Prasarana)**

Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, perdagangan, dan jasa akan terhambat, bahkan dapat macet tanpa adanya prasarana dan sarana yang memungkinkan kelancaran arus bahan, barang, dan jasa. Angkutan melalui darat, laut, dan udara yang dikelola secara terpadu dan didukung oleh jaringan komunikasi yang luas serta lembaga-lembaga keuangan yang mumpuni merupakan syarat mutlak bagi perkembangan ekonomi melalui produksi barang dan jasa yang ditunjang oleh distribusi dan perdagangan yang lancar.

h) **Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

SDM yang berkualitas serta berjiwa kewirausahaan mempunyai arti positif bagi peningkatan ketahanan ekonomi. SDM Indonesia yang jumlahnya cukup besar dengan kualitas relatif masih rendah dengan persebaran yang tidak merata dan struktur yang tidak menguntungkan merupakan beban dan sumber kerawanan sosial ekonomi. Untuk itu, diperlukan pembinaan yang serasi terhadap manusia Indonesia sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan ekonomi.

i) **Potensi dan Pengelolaan Sumber Dana**

Dana yang berasal dari dalam dan luar negeri sangat penting bagi upaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan ekonomi. Dana dari luar yang terlalu besar dengan penggunaan yang tidak produktif serta menimbulkan ketergantungan negara akan mengakibatkan kerawanan sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan mobilitas dana dalam negeri melalui sistem perpajakan di samping dana tabungan masyarakat sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi yang didukung oleh kebijakan moneter yang mantap.

3) **Pembinaan Ketahanan Ekonomi**

- a) Sistem ekonomi harus dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan

pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- b) Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sistem persaingan bebas (*free fight liberalism*) yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan ekonomi kerakyatan berkembang;
 - (2) Sistem etatisme, dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara; dan
 - (3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- c) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antarsektor pertanian dengan perindustrian dan jasa.
- d) Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, serta memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Harus diusahakan keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, badan usaha milik negara, koperasi, badan usaha swasta, dan sektor informal untuk mewujudkan pertumbuhan pemerataan dan stabilitas ekonomi.
- e) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antarsektor.
- f) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis dalam mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal dengan sarana iptek tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan serta dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi.

g. Gatra Sosial Budaya

1) Konsepsi Ketahanan Sosial Budaya

Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama, yaitu segi sosial manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerja sama dengan sesama manusia dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Dengan demikian, pengertian sosial pada hakikatnya pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai dan norma kebersamaan. Rasa senasib dan sepenanggungan, tertib sosial, dan solidaritas merupakan unsur pemersatu. Adapun hakikat budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan pencipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan yang menghasilkan karya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik social budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Ketahanan sosial budaya mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia, yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya ketika setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia akan memberikan landasan semangat dan jiwa secara khas serta merupakan ciri elemen-elemen sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia.

2) Analisis Permasalahan

a) Kebudayaan Daerah

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan subetnis yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Karena

suku-suku bangsa tersebut mendiami daerah-daerah tertentu, kebudayaannya sering disebut sebagai kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan daerah sebagai suatu sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan gaya hidup merupakan identitas dan menjadi kebanggaan dari suatu bangsa yang bersangkutan.

Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, atau sering disebut sebagai local genius yang mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya asing tanpa kehilangan identitasnya. Local genius inilah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralkan pengaruh negative budaya asing.

Kebudayaan suku-suku yang mendiami wilayah nusantara ini telah lama saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam kesetaraan. Dalam kehidupan bernegara saat ini, dapat dikatakan bahwa kebudayaan daerah merupakan kerangka dari kehidupan social budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa tidak akan terlepas dari perkembangan sosial budaya daerah.

b) Kebudayaan Nasional

Mengingat bangsa Indonesia dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami bumi usantara, kebudayaan bangsa Indonesia (kebudayaan nasional) merupakan hasil (resultant) interaksi dari budaya-budaya suku bangsa (budaya daerah) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudayaan nasional juga dapat merupakan hasil interaksi dari nilai-nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar (asing) yang kemudian juga diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Hal yang penting adalah bahwa interaksi budaya tersebut harus berjalan secara wajar dan alamiah. Tidak ada unsur pemaksaan dan dominasi budaya satu daerah tertentu terhadap budaya daerah lainnya. Dengan demikian, kebudayaan nasional akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya budaya daerah.

Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntutan dasar dari segenap sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia. Secara umum gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan tuntutan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut:

(1) Bersifat religius;

- (2) Bersifat kekeluargaan;
 - (3) Bersifat hidup serba selaras; dan
 - (4) Bersifat kerakyatan.
- c) Integrasi Nasional
- Komunikasi dan integrasi sosial yang dilakukan oleh suku-suku bangsa yang mendiami bumi Nusantara ini. Pada tahun 1928 telah mampu menghasilkan aspirasi bersama untuk hidup bersama sebagai satu bangsa di satu tanah air. Aspirasi ini terwujud secara hukum dan diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya justru merupakan hikmah bagi bangsa Indonesia dan pada masa lalu telah mampu memunculkan faktor-faktor perekat persatuan dan integrasi bangsa. Pada masa depan upaya untuk melestarikan keberadaan faktor perekat persatuan bangsa, yaitu keinginan dan semangat untuk hidup bersama dan meraih cita-cita bersama, akan menjadi tugas seluruh warga bangsa.
- d) Kehidupan Beragama
- Sila pertama dari Pancasila menuntun setiap warga bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupannya berdasarkan keyakinan terhadap agama tertentu yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut harus diamalkan dalam setiap sikap, perilaku, dan gaya hidup warga bangsa. Pengamalan dari ajaran agama secara benar akan menumbuhkan suasana kehidupan masyarakat yang sangat baik.
- e) Pendidikan
- Pendidikan adalah upaya secara sadar dan tertib untuk merubah dan mengembangkan sikap, perilaku, dan nilai sosial budaya ke arah yang dikehendaki. Interaksi dengan budaya baru diperoleh melalui Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan yang mantap serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membentuk budaya bangsa sangat tangguh.
- 3) Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya
- a) Pengembangan Sosial Budaya
- Pengembangan sosial budaya bangsa Indonesia berjalan bersama dengan pengembangan sosial budaya daerah. Kebinekaan budaya daerah yang merupakan kekayaan bangsa justru menuntut agar pengembangan sosial budaya daerah mendapatkan prioritas. Dengan berkembang sosial budaya daerah, sosial budaya bangsa yang merupakan hasil atau resultan sosial budaya daerah akan berkembang pula.
- b) Toleransi Kehidupan Beragama

Pembinaan kehidupan beragama tidak hanya mencakup penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk diri manusia pemeluknya, tetapi harus disertai pemahaman dan penghormatan terhadap keberadaan agama lain beserta masyarakat pemeluknya.

c) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai perwujudan budaya bangsa. Sesuai dengan kekhasan budaya bangsa yang terdiri atas unsur-unsur budaya daerah yang beraneka ragam, bangsa Indonesia seharusnya mampu melahirkan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru atau teknologi yang sesuai dengan identitas bangsa.

h. Gatra Pertahanan dan Keamanan

1) Konsepsi tentang Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Kondisi yang dinamik itu juga dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG yang datang dari luar atau dari dalam serta yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat. Daya tangkal itu mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Dengan beranalog dengan pengertian ketahanan nasional, ketahanan pertahanan dan keamanan pada hakikatnya adalah

keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta. Pada saat seluruh potensi dan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, kepolisian, dan intelijen disusun dan dikerahkan secara terpimpin terintegrasi dan terkoordinasi untuk menjamin penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), dapat terjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditandai hal-hal berikut.

a) Pandangan Bangsa Indonesia tentang Perang dan Damai.

Bangsa Indonesia cinta damai dan ingin bersahabat dengan semua bangsa negara di dunia serta tidak dikendaki terjadinya sengketa bersenjata atau perang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berhasrat dalam setiap penyelesaian pertikaian, baik nasional maupun internasional selalu mengutamakan cara-cara damai. Walaupun cinta damai, bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila, kemerdekaan, dan kedaulatan negara Republik Indonesia serta keutuhan bangsa.

b) Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandasi oleh landasan ideil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan dan wilayah, terpeliharanya keamanan nasional, dan tercapainya tujuan nasional.

c) Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta kerelaan berjuang dan berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tanpa mengenal menyerah. Upaya pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional tersebut dirumuskan ke dalam doktrin yang selama ini disebut Doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta Negara Republik Indonesia.

d) Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia diselenggarakan sishankamrata yang bersifat total, kerakyatan, dan kewilayahan. Pendayagunaan potensi nasional dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara dilakukan secara

optimal dan terkoordinasikan untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan dan keserasian antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

- e) Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta diorganisasikan ke dalam satu wadah tunggal yang dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembangunan angkatan perang Republik Indonesia (APRI) dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional tetap diabdikan bagi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Analisis dan Permasalahan

Faktor-faktor penting yang memengaruhi upaya peningkatan ketahanan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah sebagai berikut.

a) Geografi

Untuk dapat mempertahankan negara sesuai dengan sifat geografi Indonesia yang berupa kepulauan nusantara, diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia yang bermutu, mahir dalam melaksanakan operasi-operasi gabungan, dan memiliki kemampuan startegis yang memadai sebagai faktor penangkal dengan kemampuannya untuk menguasai dan melindungi setiap titik, setiap jengkal tanah, dan wilayah perairan di setiap penjuru tanah air serta wilayah udara di atasnya.

b) Demografi

Pemerataan, persebaran, dan kepadatan penduduk kurang proporsional sehingga banyak terdapat daerah-daerah strategis yang relatif terlalu jarang dan terlalu padat penduduknya. Kualitas penduduk yang mampu berperan positif dalam keamanan nasional sangat menentukan karena ketahanan pertahanan dan keamanan merupakan usaha integral rakyat.

c) Sumber Kekayaan Alam

Sumber kekayaan alam pada umumnya makin lama semakin langka, sedangkan kebutuhan manusia terus meningkat, seolah-olah tidak ada batasnya. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antara kebutuhan dan sumber daya alam yang ada. Karena tidak adanya kepastian masa depan, upaya hankamneg harus senantiasa diarahkan untuk memperhitungkan apa yang bakal terjadi pada masa depan. Selanjutnya, harus selalu dirumuskan jalan dan tindakan apa yang perlu dipilih untuk menghadapi setiap perubahan. Dengan demikian, diharapkan ketidakpastian dapat

ditekan serendah-rendahnya dengan perjuangan, perhitungan, dan kesiagaan untuk menghadapi setiap kemungkinan.

d) Kondisi Internasional

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pada hakikatnya pertentangan-pertentangan internasional merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan nasional setiap negara. Kondisi internasional menunjukkan tidak adanya polarisasi perimbangan kekuatan yang tidak lagi didasarkan atas sistem bipolar. Akan tetapi, hal itu lebih merupakan perimbangan kekuatan yang bersifat polisentris dengan kepentingan-kepentingan nasional bangsa-bangsa yang bersangkutan berupa regionalisme dan koeksistensi yang sangat menonjol. Adanya tekanan-tekanan internasional yang dalam kelanjutannya dapat terwujud dan berakibat timbulnya konflik-konflik bersenjata.

e) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di negara-negara maju mengakibatkan ketinggalan dan ketergantungan Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu diambil langkah yang konkret untuk mengurangi lebarnya jurang ketinggalan tersebut. Dalam upaya di bidang hankamneg perlu diusahakan peningkatan kemampuan nasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan pengembangan, khususnya dalam mendukung sistem senjata teknologi (sistek).

f) Kepemimpinan dan Manajemen

Berhasil atau gagalnya bangsa Indonesia di bidang hankamneg akan sangat dipengaruhi oleh adanya kepemimpinan yang kuat, bersih, berwibawa, dan dinamis serta mendapat kepercayaan rakyat, terutama pada masa-masa kritis ketika kepemimpinan diperlukan untuk dapat menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Kemampuan manajemen sesuai dengan kepribadian Indonesia pada semua eselon perlu ditingkatkan. Anggaran pertahanan dan keamanan sangat terbatas akan lebih memerlukan tingkat efisiensi manajemen yang tinggi dan kearifan dalam memperjuangkan anggaran yang lebih memadai.

3) Pembinaan Ketahanan Pertahanan dan Keamanan

a) Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan melalui penyelenggaraan sishankamrata untuk menjamin keseimbangan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- b) Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara yang mencakup wilayah tanah air beserta segenap isinya merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara. Oleh karena itu, haruslah diselenggarakan dengan mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
- c) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan nasional untuk kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- d) Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
- e) Perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan serta kemampuan pertahanan dan keamanan sedapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri. Pengadaan dari luar negeri dilakukan karena terpaksa dan industri dalam negeri masih terbatas kemampuannya. Oleh karena itu, harus ditingkatkan kemampuannya.
- f) Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan haruslah diselenggarakan oleh manusia-manusia yang berbudi luhur, arif bijaksana, menghormati hak asasi manusia (HAM), dan menghayati makna nilai serta hakikat perang dan damai. Kelangsungan hidup dan perkembangan hidup bangsa memerlukan dukungan manusia-manusia yang bermutu tinggi, tanggap dan tangguh serta bertanggung jawab, serta kerelaan berjuang dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi.
- g) Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tantara professional dan tentara nasional, TNI berpedoman pada saptamarga yang merupakan penjabaran Pancasila. Sebagai kekuatan pertahanan dalam keadaan damai, TNI dikembangkan dengan kekuatan kecil, profesional, efektif, efisien, dan modern bersama segenap kekuatan perlawanan bersenjata dalam wadah tunggal TNI disusun dalam sishankamrata dengan strategi penangkalan.
- h) Sebagai kekuatan inti kamtibmas, Polri berpedoman pada tribrata dan caturprasetia dan dikembangkan sebagai kekuatan yang mampu melaksanakan penegakan hukum, memelihara, dan mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat.

- i) Masyarakat secara terus-menerus perlu ditingkatkan kesadaran dan ketaatannya pada hukum.

Dengan demikian, ketahanan pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Matriks Penyelarasan Kinerja Bintannas

Tujuan bintannas: Mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

INPUT	PROSES	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
SDM: Setjen Wantannas dengan melibatkan 3 Jalur Nara Sumber	Penyusunan rencana Bintannas merujuk pada RPJP, RPJMN dan RKP untuk mengetahui sasaran umum dan sasaran prioritas dari pembangunan nasional pada aspek geografi, kekayaan alam, kependudukan dan aspek ipoleksosbudhankam. Atas dasar tersebut kemudian disusun Renstra dan RKT Setjen Wantannas.	Rancangan Kebijakan Bintannas yang disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Wantannas.	Geografi, Indonesia menanamkan kesadaran masyarakat sedini mungkin tentang konstelasi geografis Indonesia, baik kerawanan maupun potensinya	Seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia menikmati hasil-hasil pembangunan yang tercermin dalam terpenuhinya kebutuhan pokok hidup baik fisik maupun non fisik.	Terjaminnya keselamatan bangsa dan negara.
Keppres 101/199, Persesjen Wantannas, Kepsesjen Wantannas.	Kegiatan kajian Bintannas	Kebijakan Bintannas yang ditetapkan melalui sidang Wantannas	Sumber kekayaan alam, terbinaanya kesadaran nasional untuk pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam serta penggarapan secara tersinkronisasi dan terintegrasi oleh berbagai pihak guna pencapaian hasil yang optimal serta pengamanan yang maksimal sehingga tetap terjaga kondisi kelestarian dan	kesejahteraan dan keamanan dari hasil-hasil pembangunan berbasis sistem nilai ke Indonesiaan.	Terjaminnya pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia

INPUT	PROSES	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			keharmonisan lingkungan		
Bahan Kerja: Aplikasi Pengolah Data, ATK	Rekomendasi dan saran tindak BINTANNAS disidangkan melalui mekanisme uji-1, uji-2, uji-3 dan dilaksanakannya Sidang Wantannas untuk penetapan kebijakan.		Kependudukan, pertumbuhan dan persebaran penduduk secara serasi serta peningkatan kualitas penduduk yang memadai dengan memperhatikan komposisi penduduk yang ada	merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.	
Peralatan Kerja: Komputer, Laptop, Data Center, LAN			Pancasila sebagai ideologi negara mampu menghadapi dan menolak pengaruh ideologi asing; liberalisme; komunisme; fundamentalisme; otoritarianisme; radikalisme dan fasisme		
Anggaran: DIPA Setjen Wantannas Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional			Politik Indonesia mencakup politik luar negeri yang bebas aktif tidak tergantung pada kebijakan atau politik negara-negara asing, politik dalam negeri mampu membangun stabilitas politik yang menopang pembangunan nasional.		
			Ekonomi yang mampu memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat umum dan memenuhi hajat hidup orang banyak tetapi tidak menutup hak-hak individual, serta mampu mencegah monopoli, monopsoni, dan kooptasi		

INPUT	PROSES	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			penguasaan sumber kekayaan alam oleh asing		
			Sosial budaya, mampu merawat kebhinekaan, menolak pengaruh radikalisme dan terorisme serta mampu menjaga toleransi, kerekatan antar anak bangsa dan mampu mencegah konflik horizontal.		
			Pertahanan yang mampu menjaga kekuatan efek jera untuk menjaga yuridiksi wilayah nasional, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Keamanan yang mampu menjaga rasa aman, nyaman di kalangan masyarakat serta pengeakkan hukum yang adil tidak diskriminatif.		

2. BINBELNEG

Menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang multi dimensional, bangsa Indonesia diharapkan mampu menangkal berbagai hambatan dan gangguan yang mengancam ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, sehingga bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat terus mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah berbagai tantangan dan ancaman. Di samping itu bangsa Indonesia juga diharapkan mampu memanfaatkan tantangan sebagai peluang yang ada untuk kejayaan bangsa dan negara, kemakmuran dan kesejahteraan sosial serta keadilan sesuai dengan cita cita proklamasi.

Oleh sebab itu, negara bangsa ini (negara, wilayah dan warga negaranya) harus selalu memelihara ikatan ideologisnya yang disebut 'empat konsensus

berbangsa dan bernegara' yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam suatu upaya yang terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable efforts*).

Pada era Orde Baru, pemerintah menilai bahwa upaya tersebut di atas sangat diperlukan dalam rangka membangun dan memantapkan karakter bangsa (*nation character building*) dengan membentuk lembaga BP-7 tingkat pusat (Keppres nomor 10 tahun 1979) dan tingkat daerah (Kepmendagri nomor 239 tahun 1980) untuk melaksanakan TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun pada awal era reformasi tahun 1999, dengan adanya perubahan ketatanegaraan serta pertimbangan politik saat itu, Ketetapan MPR tersebut telah dicabut, dan lembaga BP-7 tersebut dibubarkan. Dengan kata lain sejak saat itu pembinaan untuk menanamkan ideologi Pancasila dan rasa cinta tanah air atau rasa bela negara mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran.

Di sisi lain, saat ini terjadi perubahan yang signifikan dalam hal spektrum ancaman terhadap tetap tegaknya suatu negara bangsa, termasuk Indonesia. Jika dalam beberapa dekade ke belakang spektrum ancaman yang dianggap dapat menghancurkan atau membubarkan suatu negara hanya bersifat militer saja, maka sekarang tidak lagi demikian. Hal yang dapat menghancurkan atau membubarkan suatu negara bukan hanya berasal dari ancaman militer, tetapi juga bisa spektrum ancaman yang berjenis non-militer, antara lain dalam bentuk gerakan separatis, gerakan terorisme lokal dan internasional, konflik komunal berdasar SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), diseminasi dan penetrasi ideologi dan budaya asing, korupsi, kemiskinan kronis, perdagangan manusia (*human trafficking*), perusakan alam dan lingkungan hidup yang mengakibatkan perubahan iklim (*climate change*), wabah penyakit (*health pandemic*), keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan, gangguan/kejahatan maupun serangan siber. Bahkan, saat ini juga berkembang spektrum ancaman yang merupakan gabungan dari keduanya (militer dan non-militer) yang saat ini dikenal sebagai ancaman jenis hibrida.

Fenomena tersebut di atas mengharuskan kita mendefinisikan ulang apa yang kita maksud dengan Bela Negara. Perubahan paradigma tentang bela negara ini sebenarnya dapat merujuk dalam amandemen ke II UUD 1945, dimana klausul/diktum tentang upaya pembelaan negara dikeluarkan dari Bab XII Pertahanan Negara pasal 30 (UUD 1945 sebelum amandemen) ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27 (setelah amandemen). Dipindahkannya klausul/diktum upaya pembelaan negara ke dalam Bab X Warganegara dan Penduduk pasal 27 tersebut ini dapat dimaknai bahwa bangsa dan negara kita memiliki paradigma baru bahwa upaya pembelaan

negara tidak bisa hanya dipahami berdasarkan spektrum ancaman militer maupun dimensi pertahanan saja, namun harus juga dipahami berdasarkan perkembangan spektrum ancaman yang semakin multi dimensi yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hukum, teknologi informasi, dan lain-lain. Paradigma baru tentang bela negara ini memiliki pemahaman yang lebih luas dimana setiap warga negara dan seluruh bangsa Indonesia harus mampu melaksanakan upaya bela negara yang tidak harus selalu dalam dimensi militer / pertahanan / perang, namun sesuai dengan profesi / bidang tugasnya masing-masing.

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, beberapa Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah telah menyelenggarakan program yang terkait dengan pemantapan bela negara. Namun, hasil evaluasi dari penyelenggaraan program tersebut disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan program tersebut masih bersifat parsial dan kurang terkoordinasi dengan baik, serta kegiatan yang dilaksanakan masih cenderung 'militeristik';
- b. Materi dalam bentuk modul dan bahan ajar belum terstandarisasi dan belum menyentuh seluruh segmen masyarakat (kurang masif);
- c. Disain kurikulum belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, maupun dengan berbagai keragaman dan kearifan lokal di daerah;
- d. Pencapaian hasil belum optimal meskipun telah dibentuk berbagai lembaga dan forum: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (30 provinsi dan 58 kota/kab), Forum Pembauran Kebangsaan (30 provinsi dan 319 kota/kab), Forum Kerukunan Umat Beragama (34 provinsi dan 365 kota/kab), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (32 provinsi dan 375 kota/kab), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (32 provinsi).

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diperlukan adanya Program-program Bela Negara di Kementerian, Lembaga dan Pemda yang lebih terarah, terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan dalam satu kesatuan Aksi Nasional Bela Negara. Oleh sebab itu, Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional memberikan tugas kepada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk melaksanakan harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi dan pengembangan terhadap program-program bela negara yang ada di Lembaga-lembaga Pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS dan Pemda), serta pemangku kepentingan terkait, sehingga program bela negara nantinya dapat dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, integral, terstandarisasi dan masif.

Agar program bela negara nantinya dapat dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, integral, terstandarisasi dan masif, maka perlu adanya

pemahaman yang sama tentang konsepsi pembinaan Bela Negara seperti yang tergambar dalam diagram berikut ini:



- Dalam Konsepsi Pembinaan Bela Negara ini, Dewan Ketahanan Nasional yang terdiri dari Presiden, Wapres dan 14 Menteri/pejabat setingkat Menteri, berperan sebagai Pembina Utama Tingkat Nasional dalam Program Pembinaan Bela Negara.
- Peran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dalam Program Pembinaan Bela Negara adalah melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, pemantauan, serta evaluasi dan pengembangan terhadap Program Pembinaan Bela Negara yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
- Peran Lembaga Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait adalah sebagai subyek pembinaan bela negara bertugas:
 - Menetapkan Rencana Aksi Bela Negara di lingkup kerja masing-masing dengan merujuk kepada Rencana Aksi Nasional.
 - Melaksanakan Rencana Aksi tersebut berdasarkan Program Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan.
- Adapun obyek pembinaan bela negara adalah:
 - Seluruh pejabat penyelenggara negara;
 - Seluruh birokrat ASN, prajurit TNI dan Polri; dan

- Setiap warga negara dan seluruh lapisan masyarakat sesuai profesi dan segmentasinya.
- e. Kegiatan Pembinaan Bela Negara yang dilaksanakn oleh Setjen Wantannas :
- Perencanaan, melalui pembuatan rencana induk/rencana aksi, Modul Utama dan penyediaan pengajar/*trainer* tingkat nasional.
 - Koordinasi, Sinkronisasi, harmonisasi, pemantauan, pelaporan serta evaluasi terkait Internalisasi nilai-nilai bela negara yang dilaksanakan K/L dan Pemda. Internalisasi yang dilaksanakan K/L dan Pemda dilaksanakan melalui 2 (dua) metode. Pertama Metode Pendidikan, antara lain melalui pendidikan formal maupun non formal. Khusus untuk lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian, TNI dan Polri dapat mengintegrasikan materi dari Modul Utama Pembinaan Bela Negara ke dalam salah satu atau lebih Mata Pelajaran/Mata Kuliah, dan atau menjadi muatan lokal, dan atau dimasukkan dalam kegiatan ekstra kurikuler. Sedangkan pendidikan nonformal dapat berupa penataran atau pelatihan untuk membentuk kader-kader bela negara. Kedua, Metode Sosialisasi dan Diseminasi, antara lain: seminar, lokakarya, ceramah/penyuluhan, dialog interaktif, talk show, cerdas cermat, karnaval budaya, upacara nasional, iklan layanan masyarakat melalui media cetak/elektronik, internet, bioskop, dan lain-lain.
 - Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, penyusunan program dan kegiatan aksi gerakan bela negara di K/L dan Pemda, serta melaksanakan pemantauan dan pelaporan serta evaluasi dan pengembangan perihal aksi gerakan bela negara di K/L dan Pemda.

Tataran pelaksanaan pada tahap internalisasi dan aksi gerakan merupakan kewenangan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada, dimana pembiayaan kegiatan dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak lain, contohnya: bekerja sama dengan pihak swasta dalam kegiatan Lomba Karya Cipta lagu, film pendek, puisi, karya tulis, karnaval budaya, penghijauan, pembersihan lingkungan dan lain-lain yang dikaitkan dengan tema bela negara dengan pendekatan inovatif 'kekinian'.

- f. Sasaran Pembinaan Bela Negara yang diharapkan adalah tertanamnya nilai-nilai dasar bela negara yaitu rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal serta memiliki semangat mewujudkan kemakmuran rakyat pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa dalam rangka upaya bela negara.

- g. Tujuan Pembinaan Bela Negara adalah untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar bela negara dalam rangka mewujudkan situasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, mengawal upaya mencapai tujuan nasional, menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup, serta kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h. Modul Pembinaan Bela Negara.
 Dalam melaksanakan program pembinaan Bela negara yang terstandarisasi, perlu merujuk kepada suatu Modul Pembinaan yang sama, yaitu:
- Modul Utama.
 Adalah modul yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai acuan bagi Kementerian dan Lembaga dalam menyusun modul khusus.
 - Modul Khusus.
 Adalah modul yang disusun oleh Kementerian dan Lembaga sesuai dengan spesifikasi tugas dan fungsi masing-masing.

Matriks Penyelarasan Kinerja Binbelneg

Tujuan Binbelneg: Terwujudnya sikap mental dan karakter bela negara, semangat kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan serta gotong royong dalam bingkai bhineka tunggal Ika.

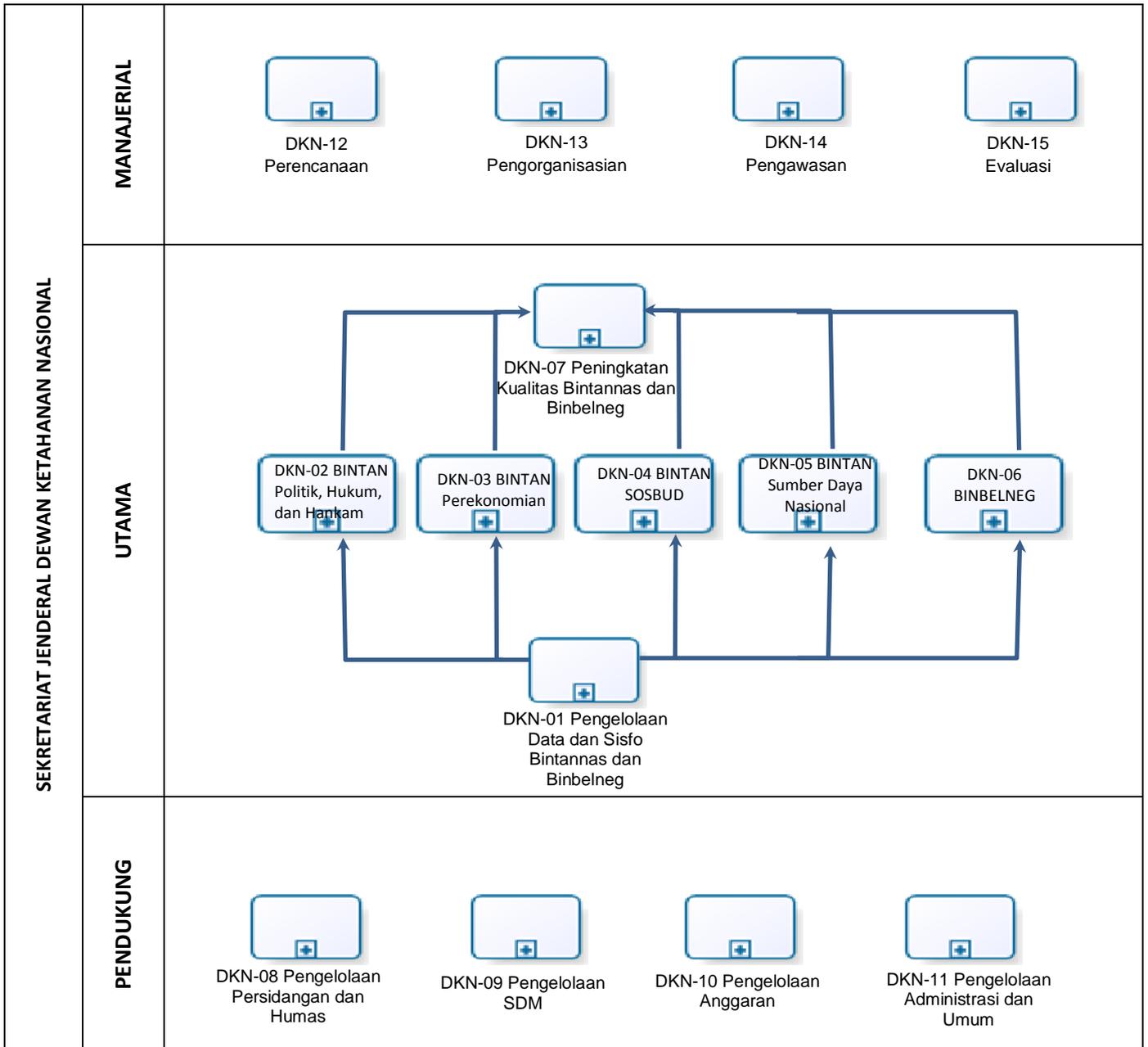
INPUT	PROSES	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
SDM: Kedeputian dengan melibatkan 3 Jalur Nara Sumber	Penyusunan rencana Binbelneg merujuk pada arahan Presiden tentang penguatan penanganan Binbelneg oleh Setjen Wantannas untuk menyusun Rencana Induk dan Rencana Aksi, sebagai bentuk harmonisasi dan sinkronisasi bagi K/L, Pemda dan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan	Rancangan Kebijakan Binbelneg yang disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Wantannas.	Kemampual awal bela negara	Semakin menguatnya nasionalisme di kalangan warga negara	Terkawalnya upaya mencapai tujuan nasional.

INPUT	PROSES	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
	Gerakan Nasional Bela Negara.				
Keppres 101/199, Arahan Presiden RI sebagaimana surat Sekretaris Kabinet Nomor B.87/Setkab/Polhukam/02/2017 Tanggal 3 Februari 2017 Perihal Arahan Presiden Mengenai Bela Negara. Persesjen Wantannas, Kepsesjen Wantannas.	Penyusunan Rencana Induk, Rencana Aksi, Monitoring dan Pengendalian serta Evaluasi dan Pengembangan.	Kebijakan Binbelneg yang ditetapkan melalui sidang Wantannas.	Rela berkorban demi bangsa dan negara	Semakin menguatnya patriotisme di kalangan warga negara	Terwujudnya situasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif.
Bahan Kerja: Aplikasi Pengolah Data, ATK	Rekomendasi dan saran tindak atas Rencana Induk, Rencana Aksi, Monitoring dan Pengendalian serta Evaluasi dan Pengembangan disidangkan melalui mekanisme uji-1, uji-2, uji-3 dan dilaksanakannya Sidang Wantannas untuk penetapan kebijakan.		Setia ideologi pancasila		
Peralatan Kerja: Komputer, Laptop, Data Center, LAN			Sadar berbangsa dan bernegara		
Anggaran: DIPA Setjen Wantannas Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional			Cinta tanah air		

E. Pemetaan Tata laksana

Pemetaan tata laksana didasarkan pada analisis tata laksana dapat digambarkan sebagaimana peta proses bisnis level 0 tersebut dibawah ini:

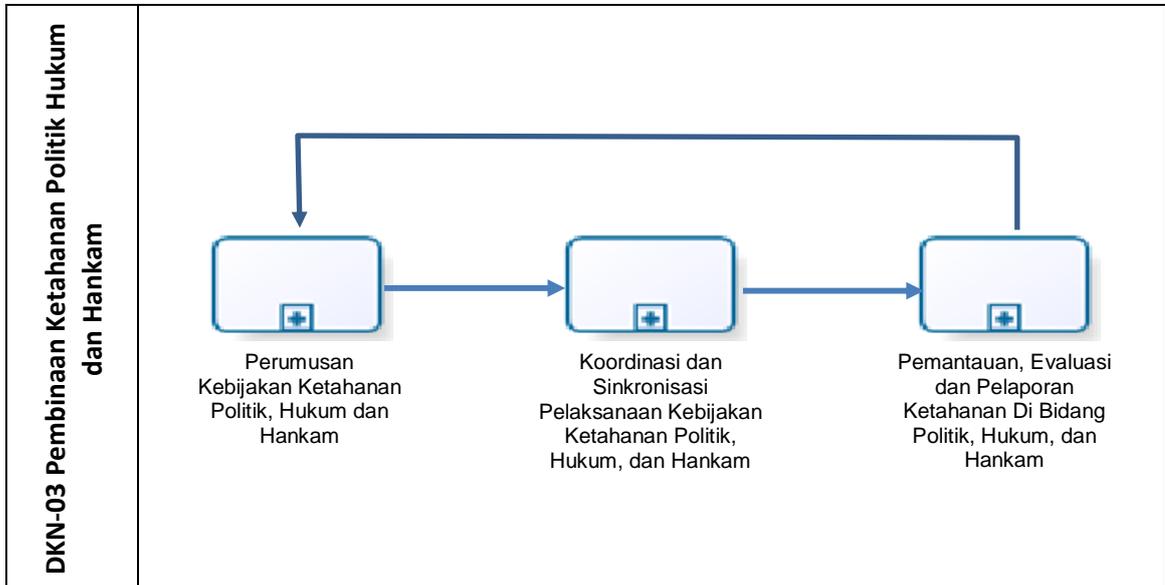
PETA PROSES BISNIS L0 SETJEN WANTANNAS



Pemetaan tata laksana pada level 0 tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam peta proses bisnis level 1 tersebut dibawah ini:

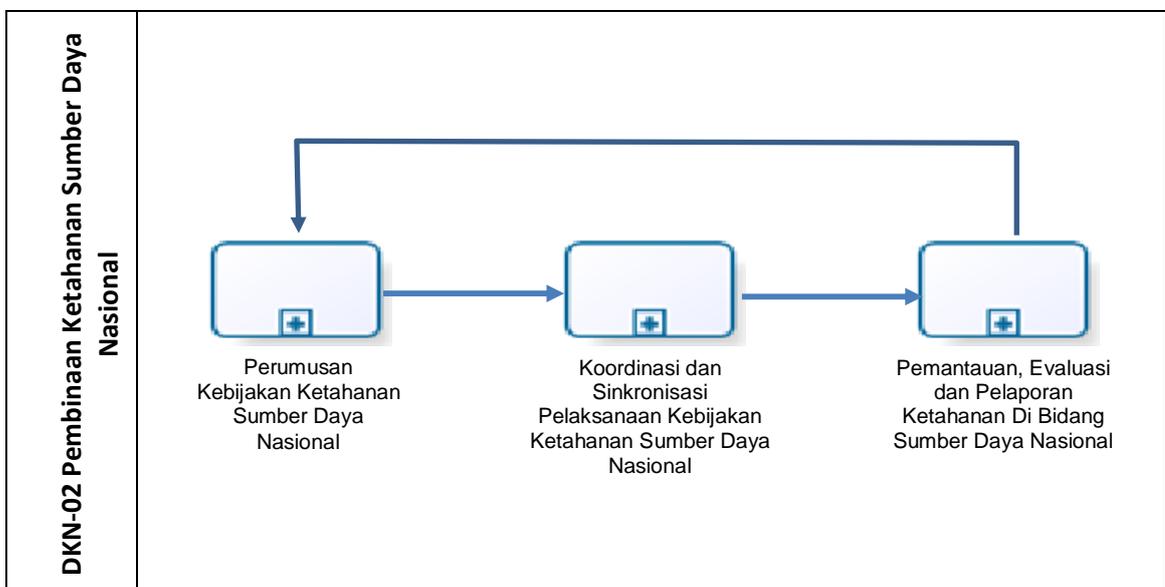
1. Proses bisnis level 1.1 Pembinaan Ketahanan Politik, Hukum dan Hankam

**PETA PROSES BISNIS L1.1
PEMBINAAN KETAHANAN POLITIK, HUKUM, DAN HANKAM**



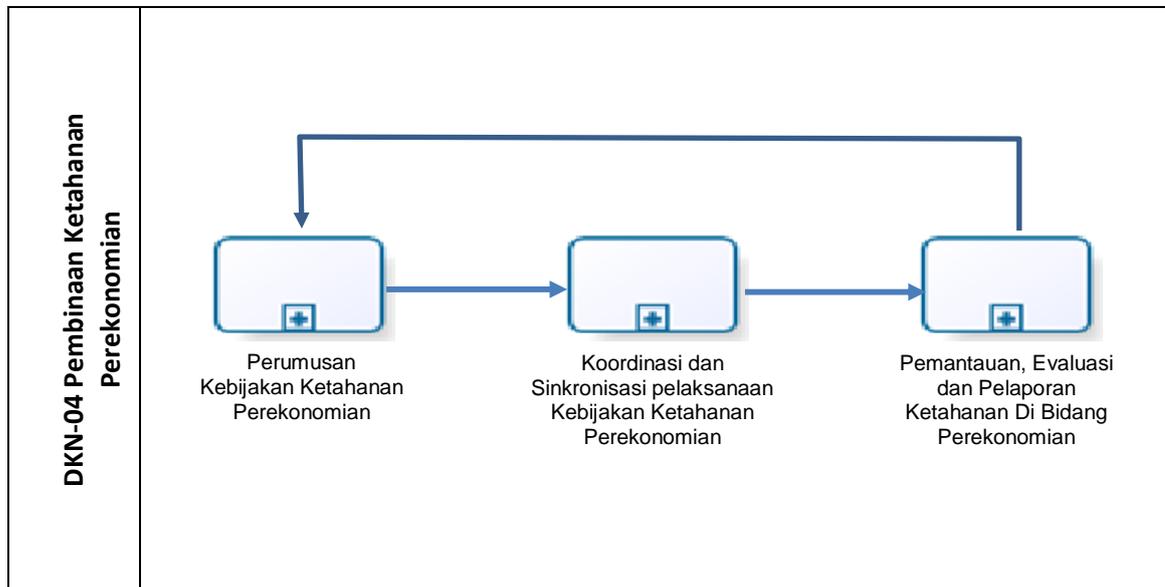
2. Proses bisnis level 1.2 Pembinaan Ketahanan Sumber Daya Nasional;

**PETA PROSES BISNIS L1.2
PEMBINAAN KETAHANAN SUMBER DAYA NASIONAL**



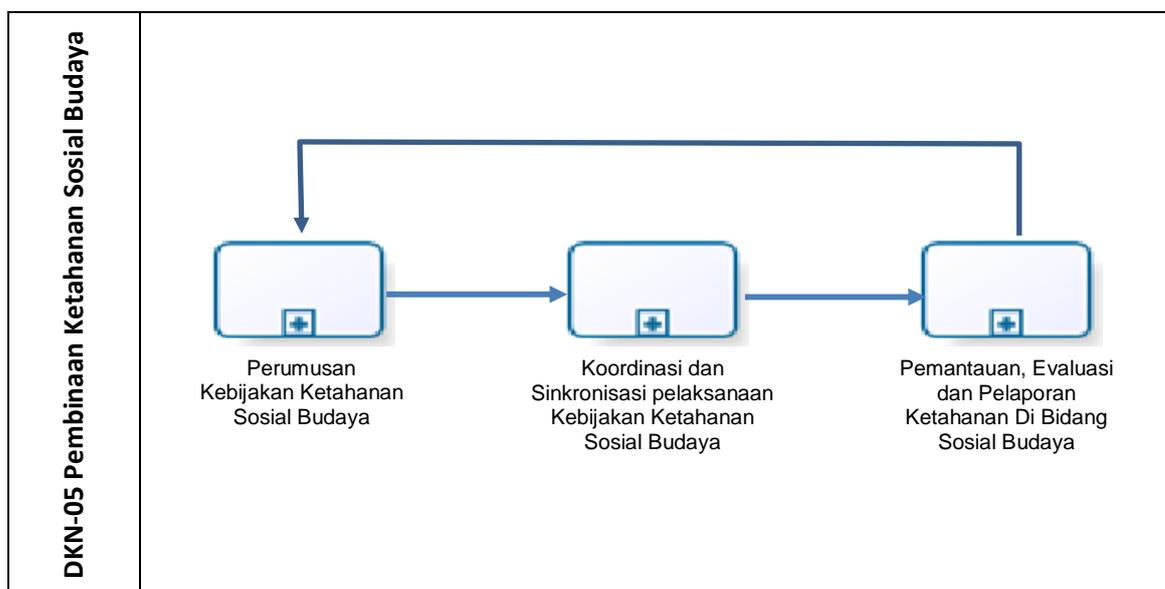
3. Proses bisnis level 1.3 Pembinaan Ketahanan Perekonomian

**PETA PROSES BISNIS L1.3
PEMBINAAN KETAHANAN PEREKONOMIAN**



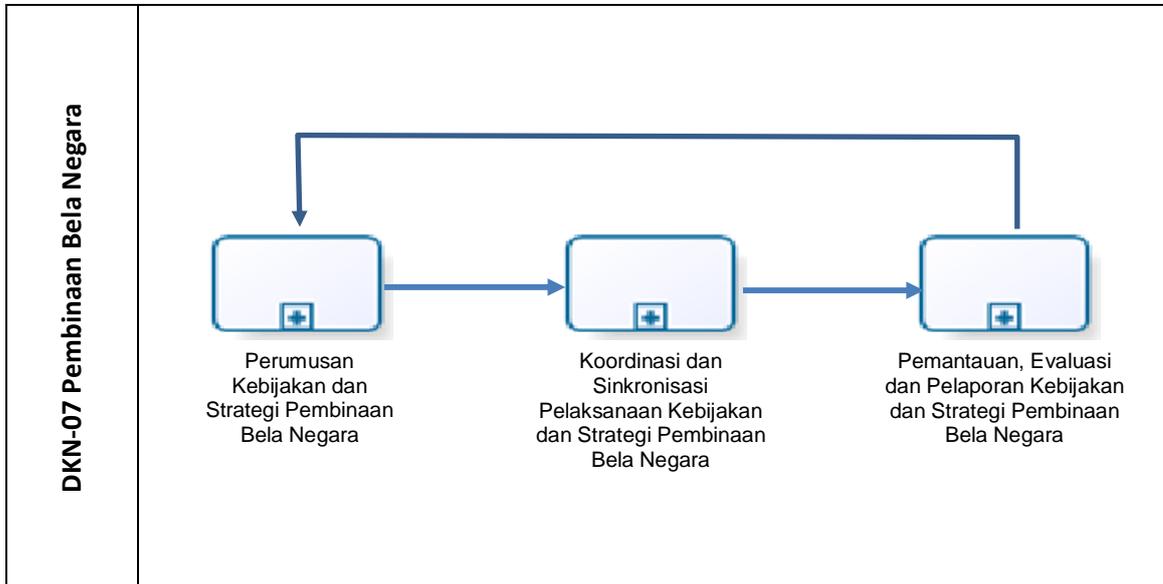
4. Proses bisnis level 1.4 Pembinaan Ketahanan Sosial dan Budaya

**PETA PROSES BISNIS L1.4
KETAHANAN BIDANG SOSIAL BUDAYA**



5. Proses bisnis level 1.5 Pembinaan Bela Negara

**PETA PROSES BISNIS L1.5
PEMBINAAN BELA NEGARA**



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penataan tata laksana (*business process*/BP) Setjen Wantannas Tahun 2017 secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan konsep penataan BP Setjen Wantannas sebagai respon atas agenda reformasi birokrasi sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design*, tuntutan dinamika perkembangan Lingstra, arahan Presiden bahwa masalah Bela Negara agar diberikan dan diperkuat penanganannya kepada Dewan Ketahanan Nasional dengan tidak membentuk organisasi baru.
2. *Business process* (BP) Setjen Wantannas (L0) disusun berdasarkan visi dan misi, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta analisis perkembangan Lingstra, dirumuskan proses utama dari fungsi kunci (L1) untuk terwujudnya sasaran strategis. Selanjutnya dirumuskan proses utama dari fungsi utama (sub proses) atas proses utama dari fungsi utama (L2) ditetapkan aktifitas pokok untuk terwujudnya fungsi dasar (L3). Atas fungsi dasar tersebut selanjutnya disusun rincian aktifitas pokok yang perlu dituangkan dalam SOP Makro (L4), dalam pelaksanaannya SOP Makro perlu didukung oleh beberapa SOP Mikro.
3. Tujuan *Business process* (BP) adalah untuk mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.
4. Dengan adanya *Business process* (BP) memberikan manfaat diantaranya: (a) menciptakan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien; (b) memastikan kontribusi kinerja masing-masing unit organisasi lebih nyata dan konkrit; (c) mengakselerasi pencapaian kinerja masing-masing unit organisasi dalam rangka mewujudkan target kinerja Setjen Wantannas; (d) sebagai dasar penyusunan standar pelayanan dan SOP; (e) perumusan dan penyempurnaan tugas dan fungsi organisasi.
5. Makna fungsi Bintannas dalam Keppres 101 Tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas belum secara tegas menjabarkan pembagian tugas dalam aspek astra gatra, sehingga berdampak pada ketidakkonsistenan dalam perspektif *cascade* dan *alignment* (penjabaran kewenangan).

B. Rekomendasi

Dalam upaya memperbaiki dan lebih menyempurnakan tata laksana Setjen Wantannas direkomendasikan beberapa langkah konkrit sebagai berikut:

1. Wantannas dengan tugas utama sebagai Bintannas, perlu penyesuaian tugas tersebut ke dalam fungsi yang mencerminkan Tannas mencakup Aspek gatra statis yaitu Geografi, Kekayaan Alam dan Kependudukan serta gatra dinamis yaitu IPOLEKSOSBUDHANKAM.
2. Berdasar arahan Presiden dalam penguatan Wantannas untuk Pembinaan Bela Negara, maka perlu dirumuskan pula BP Binbelneg.
3. Saat ini *Business Process* (BP) L0 telah tercapai sebagaimana tersebut di atas, sebagai wujud komitmen atas hasil perumusan dokumen Level K/L (L0), maka perlu mendapatkan keputusan pimpinan.
4. *Business Process* (BP) L0 perlu dijabarkan dengan perumusan dokumen Level 1 (L1), Level 2 (L2), level 3 (L3), Level 4 (L4)/SOP Makro dan SOP Mikro, sebagai tindak lanjut atas dokumen L0 yang telah dirumuskan. Perumusan dokumen ini dapat diawali dengan melakukan identifikasi proses bisnis dan SOP yang memuat fungsi kunci, sasaran strategi, IKU, kegiatan utama/fungsi utama, masukan dan keluaran atas kegiatan utama, aktifitas pokok/fungsi dasar, rincian aktifitas pokok (SOP), pengguna output, pihak yang terlibat beserta perannya dari masing-masing rincian aktifitas pokok.

Jakarta, Desember 2018

Tim Penataan Tata Laksana (*Business Process*) Setjen Wantannas Tahun 2018
Ketua



Bayu Roostono, SH., MH
Marsekal Pertama TNI